



GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University



PUSDIKLAT PENGAWASAN BPKP

GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University

PUSDIKLATWAS
BPKP

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PERATURAN KEPALA PUSDIKLATWAS BPKP

NOMOR : 1431 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklatwas BPKP periode 2020-2024 mengalami perubahan selaras dengan perubahan Rencana Strategis BPKP periode 2020-2024, yang disusun dengan mengacu pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan periode 2020-2024 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir periode Renstra atau setelahnya, misi atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dan strategi atau program-program dan kegiatan-kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi tersebut.

Dalam Renstra ini juga telah ditetapkan Target Kinerja berupa target hasil (*outcome*) dan Keluaran (*output*) yang akan menjadi komitmen bersama untuk dapat mencapai target-target kinerja tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan tetap menjaga komitmen terhadap pencapaian target kinerja yang relevan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini wajib menjadi acuan pada saat menyusun kebijakan Pusdiklatwas BPKP, dengan demikian diharapkan terdapat harmonisasi dan keterpaduan langkah untuk mewujudkan visi dan misi Pusdiklatwas BPKP.

Ciawi, 28 Agustus 2020
Kepala Pusat

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I I PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas dan Fungsi Pusdiklatwas BPKP.....	1
I.2 Struktur Organisasi Pusdiklatwas.....	3
I.3 Capaian Kinerja Sebelumnya.....	5
BAB II TARGET KINERJA, TANTANGAN DAN STRATEGI	
II.1 Visi dan Misi.....	14
II.2 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan.....	17
II.3 Tantangan dan Permasalahan.....	19
II.4 Strategi.....	21
BAB III KEGIATAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	
III.1 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan.....	24
III.2 Kebutuhan Pendanaan.....	30
BAB IV PENUTUP.....	32
Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan	
Lampiran II : Matriks Kegiatan/Output Pusdiklatwas BPKP	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015-2019	5
Tabel II.3.1	Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	23
Tabel III.1	Kegiatan/Output Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020-2024	31
Tabel III.2	Prakiraan Maju Anggaran Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020-2024 per Program Kegiatan	32
Tabel III.3	Prakiraan Maju Anggaran Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020-2024 per Sumber Pendanaan	32

BAB I PENDAHULUAN

I.1. TUGAS DAN FUNGSI PUSDIKLATWAS BPKP

Renstra BPKP tahun 2020-2024 mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya perubahan visi baru BPKP yaitu sebagai “**Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**’. Perubahan visi ini tentunya diikuti dengan perubahan signifikan pada arah kebijakan dan strategi untuk mencapai visi baru tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen Restra BPKP tahun 2020-2024.

Pusdiklatwas BPKP harus mampu menyusun Rencana Strategis yang sinergis dan terintergrasi dalam rangka pencapaian visi BPKP tersebut, namun tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam Keputusan Kepala BPKP, disebutkan bahwa Pusdiklatwas BPKP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklatwas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional, teknis substansi dan sertifikasi;
2. perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis substansi;
3. perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;
4. penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan pelaksanaan;
6. pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan aparat pengawasan intern pemerintah;
7. penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di Pusdiklatwas; dan
8. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan umum di Pusdiklatwas.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-205/K/DL/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengembangan Sistem Pembelajaran Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Pusdiklatwas BPKP selaku Kepala Unit Pengelola Pembelajaran *Government Internal Audit Corporate University* (GIA Corpu) mempunyai tugas:

1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dan teknis pengembangan system pembelajaran sumber daya manusia,
2. melakukan koordinasi dengan para Koordinator Pembelajaran pada Akademi, serta para Kepala Unit Pendukung Pembelajaran,
3. memimpin dan melaksanakan operasionalisasi sistem, proses, dan kegiatan pembelajaran,
4. menunjuk Kelompok Kerja Pembelajaran sesuai dengan Akademi yang dikembangkan pada GIA Corpu,
5. melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pembelajaran.

Terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-205/K/DL/2019 tersebut menjadi pedoman bagi sistem dan proses pembelajaran di Pusdiklatwas BPKP, sebagai Unit Pengelola Pembelajaran GIA Corpu. Sistem dan proses pembelajaran GIA Corpu, yang disebut dengan Rantai Nilai Pembelajaran (*Learning Value Chain*), akan menghasilkan solusi pembelajaran bagi pegawai, unit kerja dan organisasi, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian sasaran strategis.

Sistem dan proses pembelajaran GIA Corpu terdiri dari: Analisis Kebutuhan Pembelajaran (*Learning Need Analysis*), Desain dan Pengembangan Pembelajaran (*Learning Design and Development*), Penyelenggaraan dan Implementasi Pembelajaran (*Learning Delivery and Deployment*) dan Evaluasi dan Pengukuran Dampak Pembelajaran (*Learning Evaluation and Impact Measurement*). Pengembangan system dan proses pembelajaran GIA Corpu, yang juga mencakup metodologi dan teknologi pembelajaran akan terus dilakukan dengan penyusunan kebijakan, proses bisnis, pedoman dan prosedur operasi baku.

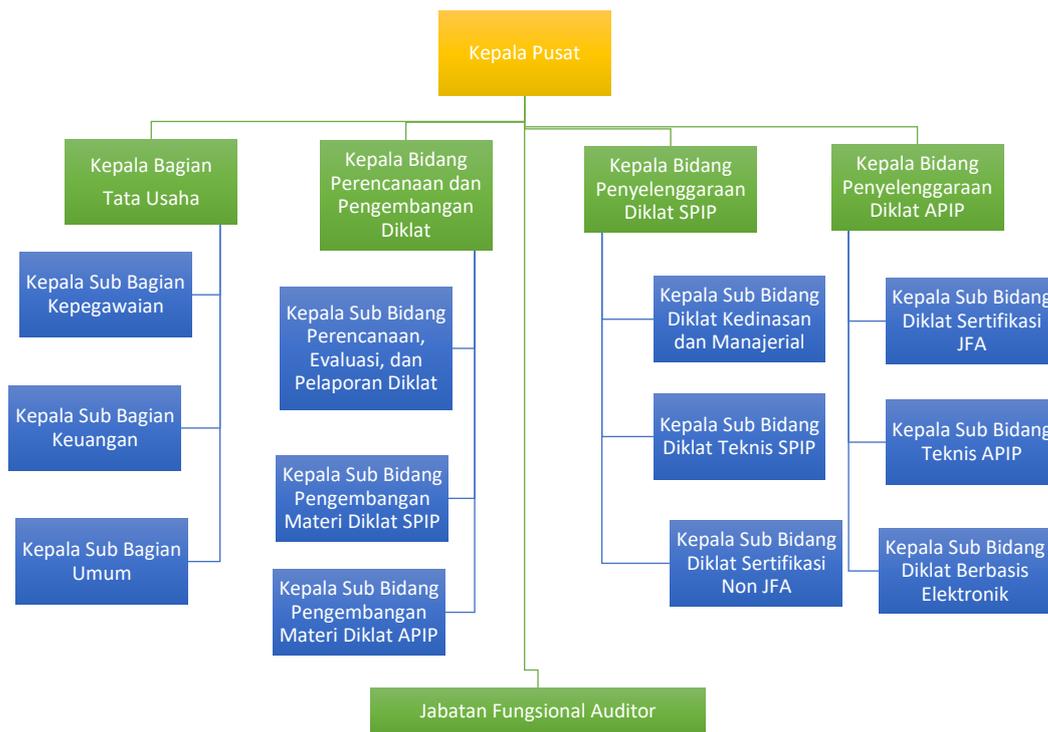


Disamping itu model pembelajaran di GIA Corpu secara bertahap akan dirancang, diselenggarakan, dan diimplementasikan dengan model 10:20:70. Model pembelajaran tersebut terdiri dari 10% kegiatan pembelajaran melalui pelatihan terstruktur dan belajar mandiri; 20% kegiatan pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan dan 70% kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran terintegrasi di tempat kerja.

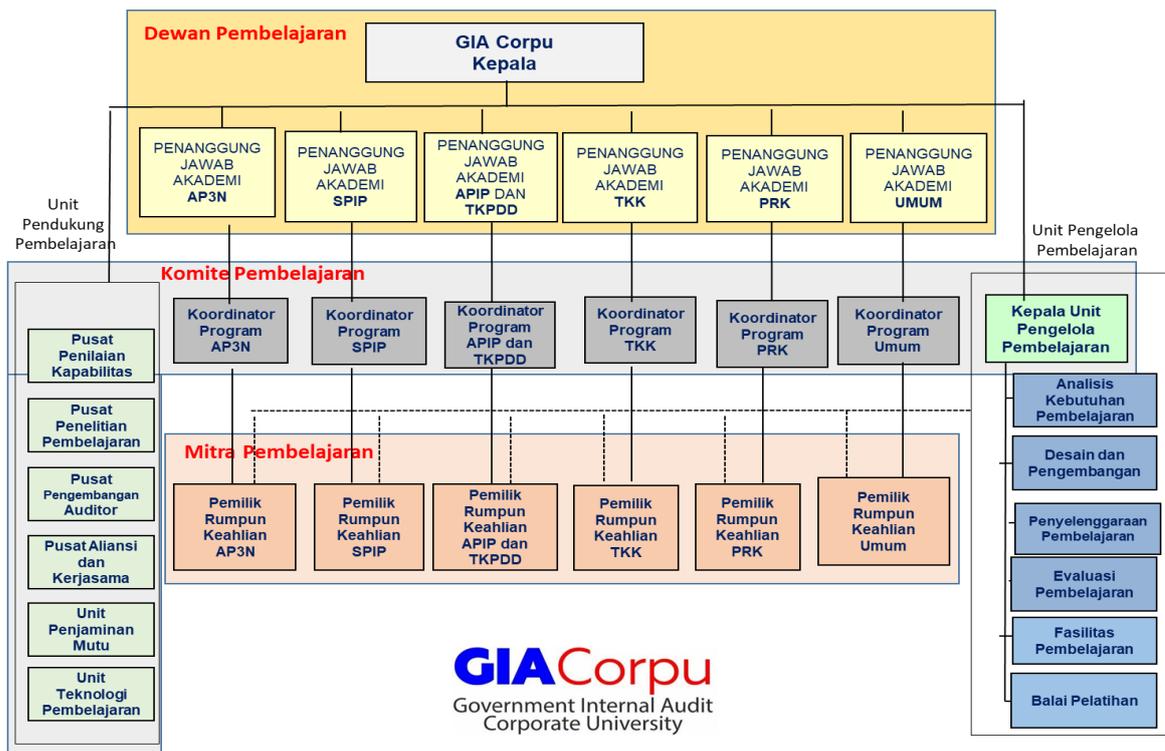
Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Arah kebijakan dan Strategi Pusdiklatwas BPKP tahun 2020-2024 disusun selain mengacu kepada Renstra BPKP tahun 2020-2024, KEP-205/K/DL/2019 juga mengacu pada hasil analisis terhadap permasalahan, potensi, kelemahan, peluang dan tantangan dalam periode lima tahun mendatang, capaian kinerja selama periode Renstra sebelumnya, serta hasil identifikasi terhadap tantangan dan permasalahan serta strategi untuk menghadapinya.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKLATWAS BPKP

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, struktur organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP adalah sebagai berikut :



Sebagai bagian dari GIA Corpu, Pusdiklatwas BPKP merupakan bagian dari tatanan atau rumah pengelolaan pembelajaran GIA Corpu yang mencakup pondasi, pilar, unit dan etalase pembelajaran yang dapat digambarkan dalam struktur tata kelola sebagai berikut:



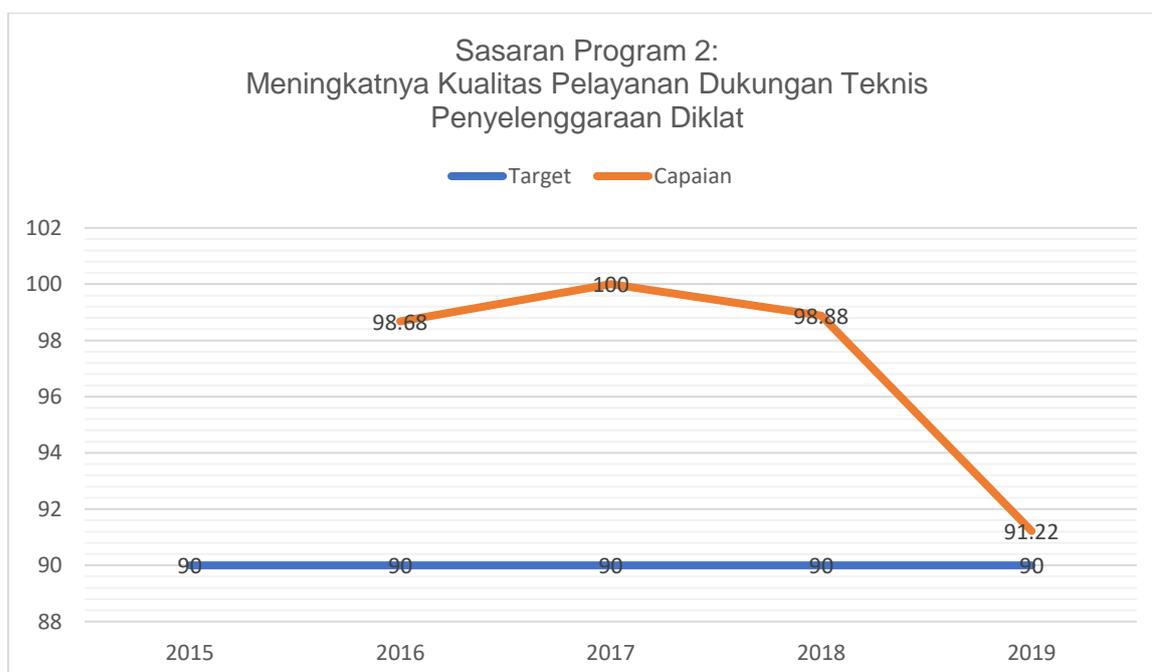
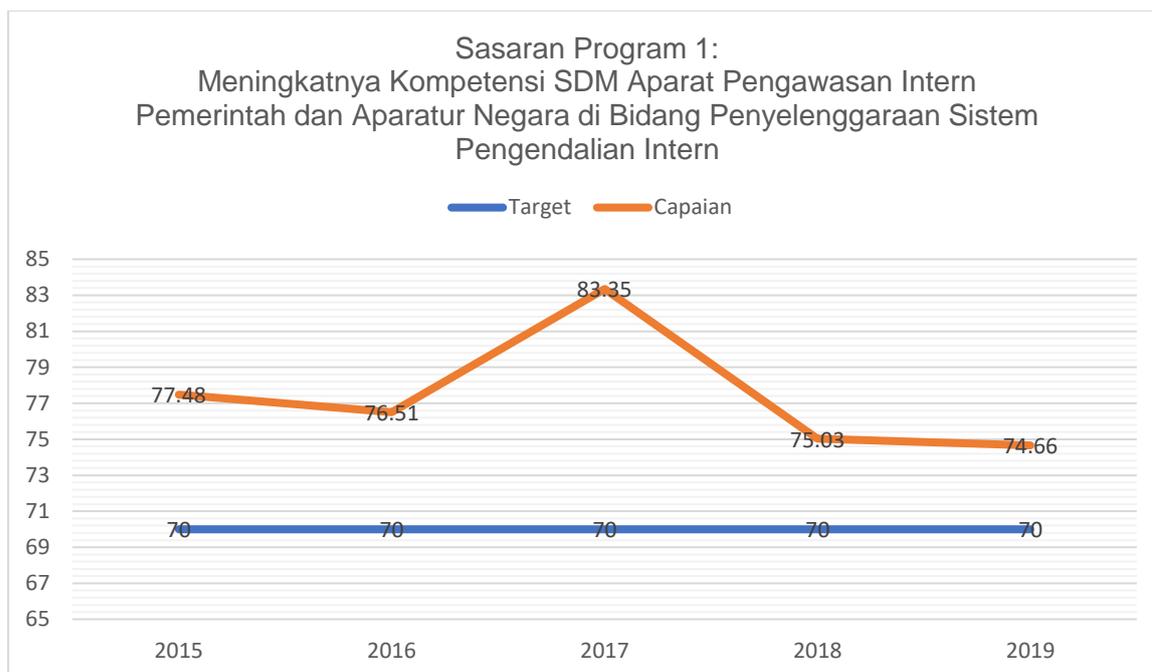
1.3. CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA

Capaian Renstra Tahun 2015-2019

Selama periode renstra sebelumnya, Pusdiklatwas BPKP telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019 melalui kegiatan kediklatan maupun pendukungnya. Capaian kinerja Pusdiklatwas Tahun 2015-2019 seperti tercantum dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian kinerja diatas 100%. Capaian tersebut disumbangkan oleh kinerja atas program dan kegiatan utama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan pendukungnya. Kegiatan utama Diklat dilaksanakan melalui pelaksanaan diklat teknis substansi, diklat fungsional auditor dan diklat kedinasan (diklat kepemimpinan dan pra-jabatan). Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Program 1:					
Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern					
1.	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat				
	Tahun 2015	%	70	77,48	110,68
	Tahun 2016	%	70	76,51	109,31
	Tahun 2017	%	70	83,35	119,07
	Tahun 2018	%	70	75,03	107,19
	Tahun 2019	%	70	74,66	106,23
Sasaran Program 2:					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Diklat					
2.	Persentase diklat yang terselenggara dengan baik				
	Tahun 2015	%	N/A	0	0
	Tahun 2016	%	90	98,68	109,64
	Tahun 2017	%	90	100,00	111,11
	Tahun 2018	%	90	98,88	109,87
	Tahun 2019	%	90	91,22	101,36



Berdasarkan tabel di atas target kinerja Program 1 dan Program 2 sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu berada di atas target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai target kinerja melampaui target kinerja yang telah ditetapkan merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Pusdiklatwas BPKP untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Pusdiklatwas BPKP tidak menjadi tanggung jawab suatu bidang atau bagian saja, melainkan suatu gabungan kontribusi dari semua bidang dan bagian terkait.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Pusdiklatwas BPKP untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten dalam bidang pengawasan. Proses pembelajaran terus dikembangkan dalam kegiatan kediklatan diarahkan pada pemanfaatan/penggunaan teknologi informasi yang dapat mempercepat pemenuhan kompetensi auditor dan pengelola keuangan di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu Pusdiklatwas BPKP selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar berbasis multimedia dan secara terus-menerus mengembangkan diri menjadi tenaga profesional di bidang diklat melalui pembelajaran secara elektronik dengan sistem *e-learning* yang dapat di akses oleh seluruh Aparat Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Secara ringkas, program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Diklat selama periode Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah dilaksanakan dengan jumlah peserta Diklat sebanyak 64.721 orang dari target 61.374 dengan peserta terdiri dari auditor APIP baik pegawai BPKP maupun Non BPKP dan peserta diklat lainnya, yang dapat dirinci sebagai berikut:



2. Penghargaan yang diperoleh selama 5 tahun baik dari eksternal & Internal dan pengakuan dari pihak eksternal dalam bentuk kunjungan studi banding ke Pusdiklatwas BPKP adalah sebagai berikut:
 - 1) Pusdiklatwas BPKP mendapatkan Penghargaan sebagai Instansi Pemerintah Pusat Terbaik II dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS tahun 2018 sesuai

Keputusan Kepala LAN Nomor: 600/K.1/HKM.02.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018, dengan Piagam Nomor 269/K.1/PDP.09.

- 2) Penghargaan dari KPPN Bogor sebagai Peringkat Kedua Terbaik Capaian IKPA Triwulan II Tahun Anggaran 2019 Kategori Satker Pengelola Pagu Lebih dari 50 Milyar Rupiah, pada tanggal 30 April 2019.
- 3) Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara RI sesuai sertifikat Nomor 701/K.1/KDK.01 tanggal 6 Agustus 2019 sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor 629/K.1/PDP.09/2019 sebagai Peringkat I Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019 *Learning Centre for the Fourth Industrial Revolution* Kategori Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional.
- 4) Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sesuai surat Nomor B/738/PP-02/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Tahun 2019, Pusdiklatwas BPKP dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,55 kategori Baik (B).
- 5) Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 10 Desember 2018 sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- 6) Pusdiklatwas BPKP seringkali menjadi tempat tujuan kegiatan studi banding, tempat studi lapangan peserta diklat, dan mendapatkan kunjungan kehormatan dari instansi/lembaga diklat lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas BPKP diakui sebagai lembaga diklat yang dapat menjadi rujukan atau contoh bagi lembaga diklat lain. Berikut di antaranya kunjungan dari :
 - a. Periode Tahun 2015
 - PT Angkasa Pura I (Persero) pada tanggal 4 Juni 2015.
 - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 6 Juli 2015.
 - Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 15 Oktober 2015.
 - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 22 Oktober 2015.
 - Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makasar (BKD) pada tanggal 5 November 2015.
 - Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG pada tanggal 11 November 2015.

- Delegasi Vietnam yang berasal dari Inspektorat Kementerian Konstruksi Republik Sosialis Vietnampada tanggal 1 Desember 2015.
- b. Periode Tahun 2016
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2016.
 - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat pada tanggal 18 Februari 2016
 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 25 Februari 2016
 - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 3 Maret 2016
 - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada tanggal 25 April 2016.
 - Lembaga Sandi Negara pada tanggal 2 Juni 2016
- c. Periode Tahun 2017
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tanggal 6 Maret 2017.
 - Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, tanggal 9 Maret 2017.
 - Balai Besar Pelatihan Peternakan, Kementerian Pertanian, tanggal 27 April 2017.
 - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPLK), Kementerian Keuangan, tanggal 10 Oktober 2017.
 - Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tanggal 2 November 2017.
- d. Periode Tahun 2018
- Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), tanggal 9 Januari 2018.
 - United States Agency for International Development (USAID), tanggal 23 April 2018.
 - Delegasi Negara Brazilia, tanggal 24 April 2018
 - Pusdiklat Televisi Republik Indonesia (TVRI), tanggal 10 September 2018.
 - Biro Pusat Statistik (BPS), tanggal 28 September 2018.
 - *International Association of Circulation Managers* (IACM), tanggal 3 Desember 2018

e. Periode Tahun 2019

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- Tim Association Government Internal Auditor (AGIA) dari Philipina.
- World Bank Bangladesh.
- Tim Pusaka Lembaga Administrasi Negara, study banding E-learning.
- Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

3. Selama kurun waktu 2015-2019 Pusdiklatwas BPKP telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 37001:2006 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari TUV Nord Indonesia, yang merupakan jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selain itu pada tahun 2018 Pusdiklatwas BPKP memperoleh Piagam Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2018.
4. Penerimaan Widyaiswara selama periode Tahun 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 6 orang, Widyaiswara yang pensiun selama kurun waktu yang sama sebanyak 2 orang dan mutasi sebanyak 1 orang.
Dengan demikian jumlah widyaiswara yang dimiliki Pusdiklatwas BPKP saat ini berjumlah 21 orang.



5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang berfungsi untuk membantu dalam pengolahan data kediklatan dengan mengembangkan berbagai aplikasi, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Aplikasi Kediklatan (SIMDIKLAT)
 - 2) Aplikasi Info Diklat
 - 3) Aplikasi Registrasi Online
 - 4) Aplikasi *E-learning* (LMS)
 - 5) Aplikasi *Massive Open Online Course* (MOOC)
 - 6) Pengembangan Aplikasi Dashboard Peserta
 - 7) Pengembangan Aplikasi Sistem Administrasi Pelaksanaan Anggaran (SAPA)
 - 8) Updating Website Pusdiklatwas

6. Perolehan akreditasi untuk melakukan akreditasi terhadap lembaga diklat lain untuk diklat fungsional dan teknis substansi dari Lembaga Administrasi Negara (Keputusan Kepala LAN Nomor 488/K1/PDP.10.4/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Pusdiklatwas BPKP Sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis Fungsional).
7. Perolehan akreditasi untuk pelaksanaan kegiatan diklat dari Lembaga Administrasi Negara dan LKPP untuk diklat-diklat berikut ini:

No.	Jenis Diklat	No. SK	Tanggal SK	Berlaku s.d.
1.	Kepemimpinan Tingkat III	Keputusan Kepala LAN Nomor 706/K1/PDP.09/2018 tentang Penetapan Pusdiklatwas BPKP Sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi	15 November 2018	15 November 2023
2.	Kepemimpinan Tingkat IV	516/K1/PDP.10.4/2015 tentang Penetapan Pusdiklatwas BPKP Sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi (dengan Akreditasi "A")	29 Desember 2015	29 Desember 2020
3.	Prajab Golongan I dan II			
4.	Prajab Golongan III			
5.	Teknis	Keputusan Kepala LAN Nomor 488/K1/PDP.10.4/2015 tentang Penetapan Pusdiklatwas BPKP Sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis Fungsional	29 Desember 2015	29 Desember 2020
6.	Fungsional			
7.	Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 2 Tahun 2017(dengan Akreditasi "A")	11 Januari 2017	11 Januari 2022

8. Penyusunan/Revisi Modul dan Buku Kerja Diklat Teknis Substansi dan Diklat Fungsional Auditor sebanyak 109 modul dan buku kerja.
9. Capaian GIA Corpu (Perjalanan GIA Corpu s.d 2019)
 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran sentral dalam bidang pengawasan internal, memiliki tugas dalam mendukung target-target pemerintah berkaitan dengan

penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan adanya isu bisnis ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh BPKP adalah menyelaraskan dan mengoptimalkan SDM yang dimiliki sehingga mampu mencapai target-target tersebut. Upaya yang paling tepat adalah dengan membentuk *corporate university*. Pembentukan *corporate university* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pergeseran proses bisnis pengawasan yang dilakukan BPKP dari yang sifatnya pengawasan operasional menjadi pengawasan yang sifatnya strategis menjadikan Pusdiklatwas memiliki fungsi strategis untuk mendukung pencapaian tujuan BPKP.
- 2) Belum sepenuhnya selaras antara apa yang dipelajari dalam pelatihan dan apa yang dibutuhkan oleh BPKP.
- 3) Pembelajaran di dalam diklat belum mengarah pada isu strategis yang paling mendesak yang harus dipecahkan.
- 4) Program dan pengembangan pelatihan seringkali tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja BPKP.
- 5) Kebutuhan pengembangan organisasi BPKP untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di bidang pengawasan
- 6) Kesadaran untuk mengembangkan diri belum merata ke seluruh pegawai.
- 7) Mengoptimalkan fasilitas e-learning yang telah dikembangkan.
- 8) Memungkinkan BPKP dapat melakukan evaluasi pembelajaran sampai ke *impact/benefit* diklat terhadap organisasi.
- 9) Mengefektifkan BPKP menjadi *learning organization*.

Dengan membentuk *corporate university*, diharapkan dapat mengubah strategi pembelajaran yang dilakukan terhadap SDM selama ini yang bersifat pembelajaran taktis dan fokus pada mengatasi kesenjangan peran pekerjaan spesifik pegawai saat ini berubah menjadi pembelajaran terintegrasi bahkan strategik yang mampu mengembangkan kapabilitas pegawai dan mengintegrasikan seluruh komponen yang mempengaruhi kinerja pegawai dan organisasi.

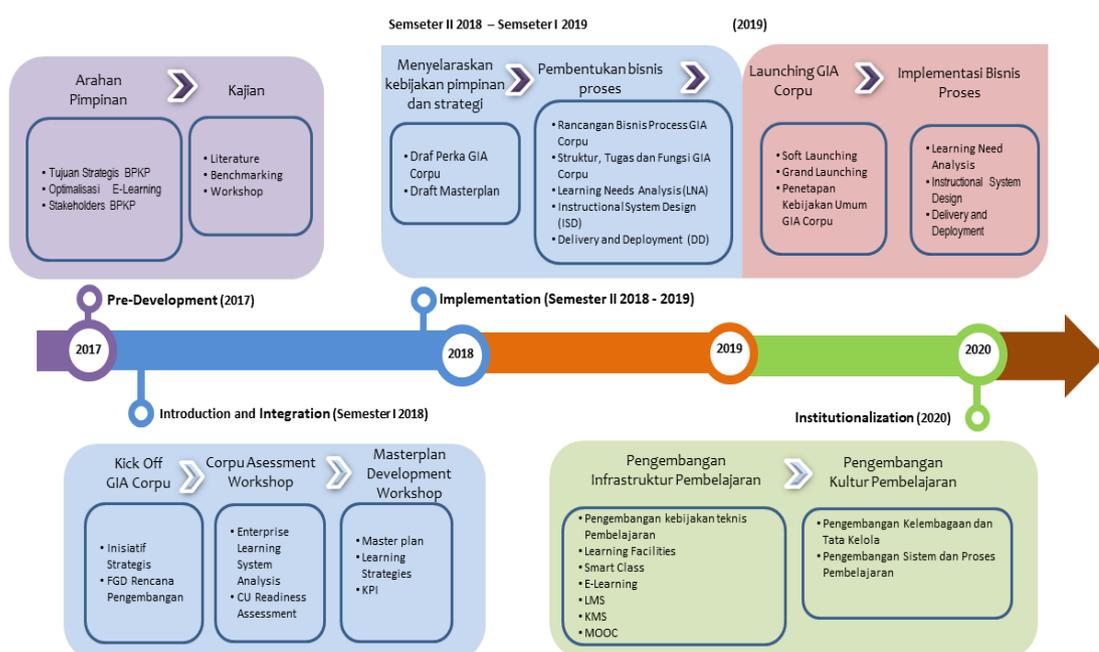
Hal tersebut dimungkinkan, karena dengan *corporate university* mampu mencakup seluruh SDM yang ada dan memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai yang beragam dengan metode pembelajaran secara virtual dan konten pembelajaran yang lebih spesifik sesuai tuntutan pekerjaan. Saat ini BPKP telah menerbitkan Keputusan Kepala Nomor KEP-205/K/DL/2019 tentang Pengembangan Sistem Pembelajaran

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Telah dilakukan evaluasi terhadap kondisi Pusdiklatwas BPKP saat ini terkait dengan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi bagian dari BPKP *Corporate University*. Beberapa hal penting yang mendukung upaya transformasi dan menjadi modal dasar bagi BPKP menjadi *Corporate University* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kurikulum Diklat JFA yang telah dilaksanakan di Pusdiklatwas BPKP telah mengacu pada Standar Kompetensi Auditor. Hal ini menjadi kekuatan yang mendukung transformasi BPKP untuk berubah menjadi *Corporate University*.
- 2) Model pembelajaran *Blended Learning* telah menyesuaikan dengan *New Adult Learning Method*. Kekuatan ini sangat mendukung peran *corporate university*
- 3) Pengembangan Layanan berbasis IT sudah berjalan dan mulai diimplementasikan.
- 4) Para Widyaiswara dan Instruktur memiliki kompetensi yang memadai di bidangnya.
- 5) Pusdiklatwas BPKP saat ini sudah dipercaya oleh APIP dan PKN/PKD baik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan SDM mereka.
- 6) Pusdiklatwas BPKP telah memperoleh akreditasi dari LAN, LKPP dan TUV-NORD.

Gambaran singkat perkembangan GIA Corpu adalah sebagai berikut:



BAB II

VISI, MISI, TARGET KINERJA DAN STRATEGI

II.1. VISI DAN MISI

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, diantaranya perubahan rencana strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BPKP perlu menjabarkan strategi BPKP ke dalam tataran operasional dalam bentuk Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP 2020-2024.

Dalam dokumen Renstra BPKP 2020-2024 secara tegas dinyatakan bahwa BPKP melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional, dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang berkualitas.

Kedua misi tersebut dapat dimaknai bahwa untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, perlu membangun SDM pengawasan yang berkualitas melalui Pengembangan SDM yang ada pada internal BPKP maupun SDM APIP di K/L/Pemda.

Pusdiklatwas BPKP sebagai salah satu unit Kerja BPKP yang diamanahi tugas untuk melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi pegawai BPKP maupun APIP K/L/Pemda, tentunya memiliki peran penting dan strategis untuk mendukung pencapaian Misi BPKP membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas tersebut. Pusdiklatwas BPKP perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menyusun dan menjalankan program dan kegiatan dalam tataran operasional yang sejalan dengan arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024.

Pusdiklatwas berupaya untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan negara, melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dapat mempercepat pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu, Pusdiklatwas selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar berbasis multimedia dan secara terus menerus mengembangkan diri menjadi tenaga profesional di bidang diklat melalui pembelajaran secara elektronik dengan sistem online yang dapat diakses oleh seluruh aparat Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu Visi yaitu :

“Menjadi Lembaga Diklat Pengawasan Intern Pemerintah Berkelas Dunia”

Pernyataan visi tersebut dirumuskan dan ditetapkan dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020-2024. Makna dari visi tersebut berarti bahwa Pusdiklatwas berupaya untuk terus mengembangkan jenis-jenis pembelajaran, khususnya yang relevan dengan pengawasan intern yang dibutuhkan oleh *stakeholders* disertai penerapan metodologi *training* yang modern berbasis teknologi informasi dan berkelas dunia. Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu mengembangkan konsep-konsep pembelajaran berkelas dunia, yang kemudian diimplementasikan untuk kepentingan *stakeholders* dan menjadi terpercaya dengan terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pembelajaran untuk *stakeholders*. Dengan demikian, etos kerja, pendekatan dan metodologi, kompetensi teknis, ataupun perangkat-perangkat pendukung lainnya dapat menjawab tantangan dan peluang baru, sehingga tidak menjadi usang, tertinggal, dan tidak berdaya guna.

Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap jajaran Pusdiklatwas BPKP. Sebagai bentuk yang lebih nyata dari visi tersebut, maka dijabarkanlah kedalam misi, sehingga **Misi Pusdiklatwas BPKP** merupakan bentuk nyata dari rumusan visi yang memberikan gambaran mengenai tugas yang diemban oleh Pusdiklatwas BPKP dalam rangka mewujudkan visi. Misi Pusdiklatwas BPKP dirumuskan ke dalam dua rumusan misi, yaitu:

- 1. Membangun Sumber Daya Manusia Pengawasan Intern Pemerintah yang Berkualitas**
- 2. Meningkatkan Kapabilitas Manajemen dan Sumber Daya Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi**

Misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat keberadaan Pusdiklatwas BPKP bagi *stakeholders* dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada aspek pendukung, berupa peningkatan kualitas manajemen pembelajaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya diklat lainnya. Dengan pendekatan ini, selain terkait dengan perspektif *stakeholders* dan *customers* juga terkait dengan *internal process* dan *learning and growth*. Misi ini merupakan implementasi visi yang ditetapkan Pusdiklatwas BPKP dalam membantu pemerintah menghadapi perubahan yang cepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. SDM yang profesional dan kompeten merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi, karena sumber daya manusialah yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. Keahlian SDM harus terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan agar dapat merespon perkembangan kebutuhan pengawasan yang terus berkembang yang salah satunya dengan pembinaan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1 e, PP Nomor 60 Tahun 2008).

Untuk mendukung misi "**Membangun Sumber Daya Manusia Pengawasan Intern Pemerintah yang Berkualitas**" tersebut, Pusdiklatwas merumuskan misi kedua yaitu "**Meningkatkan Kapabilitas Manajemen dan Sumber Daya Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi**". Misi kedua ini melingkupi rancangan dan implementasi proses manajemen dan kapabilitas sumber daya pembelajaran yang berbasis teknologi informasi yang solutif. Rancangan implementasi proses manajemen pembelajaran yang berbasis teknologi informasi meliputi rancangan arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi yang terintegrasi pada seluruh proses manajemen, serta penyiapan sumber daya manusia yang mempunyai kultur teknologi informasi.

II.2. KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Pusdiklatwas BPKP 2020-2024 mengacu pada program dan kegiatan dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024. Pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024, tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional serta terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul, sehat, dan akuntabel. Pencapaian kedua tujuan tersebut akan tercermin pada 6 (enam) sasaran strategis BPKP yang meliputi:

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah.
2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan nasional.
3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha.
4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi.
5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU.
6. Meningkatnya Tata Kelola pengawasan yang berkualitas.

Berkaitan dengan keenam sasaran strategis di atas, Pusdiklatwas BPKP sebagai salah satu unit kerja *enabler* di BPKP fokus mendukung capaian sasaran Strategis 6, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang berkualitas terutama dukungan terhadap Indeks Kesehatan BPKP yang diukur dengan melihat 9 aspek, antara lain *innovation and learning*.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Pusdiklatwas BPKP melaksanakan 2 Program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP, yaitu

1. Program Pengawasan Pembangunan
2. Program Dukungan Manajemen Internal

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Pelaksanaan Program Pengawasan Pembangunan dan Program Dukungan Manajemen Internal tersebut, Pusdiklatwas BPKP telah menyusun kegiatan yang mencerminkan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dirumuskan Indikator Kinerja Kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai dalam Periode Renstra Pusdiklatwas BPKP 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kompetensi SDM APIP					
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas layanan Pusdiklatwas					
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik"	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	90,00%

Indikator Kinerja Kegiatan pertama, berupa "Persentase SDM yang meningkat kompetensinya" diukur dari rata-rata peserta diklat yang meningkat kompetensinya per jenis diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat. Peserta Diklat yang meningkat kompetensinya untuk:

1. Diklat JFA adalah jumlah peserta diklat yang lulus ujian sertifikasi auditor dibagi jumlah peserta diklat sertifikasi auditor
2. Diklat Kedinasan adalah jumlah peserta yang lulus diklat kedinasan dibagi jumlah peserta diklat kedinasan
3. Diklat Teknis Substansi adalah jumlah peserta diklat Teknis Substansi yang berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* meningkat nilainya, dibagi jumlah peserta diklat teknis substansi
4. Diklat *Non-JFA Certification* adalah jumlah peserta diklat yang lulus ujian sertifikasi, dibagi jumlah peserta diklat sertifikasi non JFA

Indikator Kinerja Kegiatan kedua, berupa “Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal baik” diukur dari jumlah realisasi diklat yang memperoleh hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal dengan kategori “baik” dibagi jumlah seluruh diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat.

2. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja					
Indikator Kinerja kegiatan:	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%
1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	75	76	77	78	79
2. Nilai SAKIP Unit Kerja	80	81	82	83	84
3. Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
4. Indeks MR Unit Kerja	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
5. Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	70	76	80	81	82
6. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholders)	70	73	76	80	81
7. Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
8. Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9. Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
10. Skor IKPA Unit Kerja	86	87	88	89	90
11. Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90%	91%	92%	93%	95%
12. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	1	1	1	1	1
13. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

II.3. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis, perhatian terhadap kemungkinan perubahan faktor lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan hal yang penting. Wujud perhatian tersebut adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan analisis SWOT. Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang

penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Penelaahan atas kondisi internal dapat menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi, sedangkan analisis atas kondisi eksternal dapat diketahui peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menyikapi setiap perubahan dan perkembangan jaman. Analisis lingkungan yang dirumuskan oleh Pusdiklatwas BPKP sebagai berikut:

Tabel II.2.1

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN

Kekuatan (<i>Strengths-S</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses – W</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang diklat pengawasan dan kapasitas kelembagaan yang memadai. 2. Adanya sarana diklat yang memadai dan dana yang relatif cukup. 3. Tersedianya program diklat dan materi diklat pengawasan yang berkualitas 4. Kewenangan dari peraturan perundang-undangan 5. Memiliki jaringan diklat dan informasi melalui Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia 6. Memiliki pengalaman dalam bidang diklat pengawasan 7. Memiliki program Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum cukup tersedianya sumber daya manusia perancang diklat dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan digital learning. 2. Kuantitas SDM penyelenggaraan diklat yang tersedia tidak dapat memenuhi peningkatan permintaan diklat dari <i>stakeholders/customers</i>. 3. Masih diperlukannya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi pelayanan dan langsung bersentuhan dengan <i>stakeholder</i> untuk mampu beradaptasi secara cepat dengan perubahan lingkungan strategis yang disruptive. 4. Belum cukupnya kuantitas dan kompetensi tenaga pengelola IT dan multimedia yang memfasilitasi digital learning. 5. Masih belum terintegrasinya keseluruhan sistem informasi kediklatan dalam suatu sistem <i>learning value chain</i>.
Peluang (<i>Opportunities - O</i>)	Ancaman (<i>Threats – T</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kebutuhan diklat pengawasan oleh <i>stakeholder</i> untuk mewujudkan <i>good governance</i>, seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 2. Besarnya dukungan pemerintah terhadap diklat pengawasan akan meningkatkan permintaan atas produk-produk diklat pengawasan yang bersifat spesifik. 3. Meningkatnya kemajuan dan persebaran teknologi informasi komunikasi di seluruh Indonesia yang memudahkan proses digital learning. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen pimpinan APIP. 2. Meningkatnya faktor persaingan, karena adanya keinginan lembaga diklat lain untuk menyelenggarakan diklat sendiri, sehingga menurunkan <i>captive market</i>. 3. Belum tuntasnya internalisasi GIA Corpu kepada seluruh pegawai BPKP.

<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya kesadaran untuk bersinergi dalam bidang diklat pengawasan. 5. Meningkatnya tuntutan atas standar mutu dan proses kegiatan diklat pengawasan. 6. Meningkatnya kebutuhan APIP untuk dapat mengimplementasikan SPIP di lingkungan kerjanya. 7. Meningkatnya kesadaran APIP tentang manajemen risiko. 8. Meningkatnya tuntutan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Unit Kerja Instansi Pemerintah. 9. Terbentuknya GIA Corpu sebagai metodologi yang terintegrasi yang menyesuaikan pembelajaran dengan strategi organisasi. 	
---	--

Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi Pusdiklatwas BPKP berada pada posisi SO (*strength-opportunity*). Dengan posisi tersebut, Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu mengatasi segala kelemahan dan setiap ancaman ke depan dalam pencapaian sasaran dan kegiatan Pusdiklatwas BPKP.

Berdasarkan analisis internal dan eksternal di atas, dapat diidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi Pusdikltawas dalam pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan APIP masih rendah;
2. Produk layanan Pusdiklatwas BPKP kalah bersaing dengan penyelenggara diklat lain;
3. Internalisasi GIA Corpu tidak menjangkau seluruh pegawai BPKP
4. Bahan ajar yang tidak mutakhir/berumur lebih dari 3 tahun
5. Kurikulum tidak sesuai kebutuhan peserta diklat
6. Kualitas penyelenggaraan menurun(hasil evaluasi trennya menurun)

II.4. STRATEGI

Dalam rangka mendukung capaian visi dan misi BPKP, Pusdiklatwas BPKP memiliki visi dan misinya sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di bidang pengawasan sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 telah dikembangkan sebuah Sistem Pembelajaran Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menggunakan model pembelajaran yang disebut dengan *Government Internal Audit Corporate University* (GIA Corpu). Model pembelajaran GIA Corpu merupakan bagian dari pencapaian visi

dan misi organisasi melalui keterkaitan dan kesesuaian antara pengelolaan pembelajaran dan manajemen pengetahuan, serta nilai-nilai dengan target kinerja dan sasaran strategis organisasi BPKP.

arah kebijakan dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pusdiklatwas untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Strategi Eksternal

Menjaga dan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, sinergi, untuk menjaga relevansi program pembelajaran dengan kebutuhan pengguna layanan serta kualitas pembelajaran, antara lain dengan:

- a. Unit Sekretariat Utama dan Kedeputian di lingkungan BPKP (Akademi Bisnis dan Akademi Umum) sebagai unit pembelajaran dalam GIA Corpu yang berperan dalam mengembangkan kompetensi untuk menciptakan keunggulan kompetitif organisasi.
- b. Seluruh Unit Pendukung Pembelajaran (*Learning Enabler Unit*) di lingkungan BPKP dalam rangka meningkatkan dukungan dan kualitas proses pembelajaran.
- c. Jejaring kerja antar pimpinan APIP dalam rangka mengenalkan dan meningkatkan relevansi program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas.
- d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain yang menjadi mitra kerja Pusdiklatwas, baik terkait dengan program pembelajaran, tenaga pengajar, sistem informasi, dan informasi terkini tentang pembelajaran.
- e. Melakukan internalisasi mengenai model pembelajaran GIA Corpu kepada seluruh pegawai BPKP.

2. Strategi Internal

- a. Menciptakan program pembelajaran yang aplikatif dengan penerapan *Learning Value Chain* (yang dimulai dari analisi kebutuhan, desain, dan pengembangan pembelajaran) dan penyelenggaraan pembelajaran yang diikuti dengan tahapan implementasi (*learning delivery and deployment*) dan *action learning* sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- b. Meningkatkan aksesibilitas program pembelajaran dengan:

- 1) Mengintegrasikan seluruh infrastruktur pembelajaran berupa *e-learning*, *learning management system*, dan *knowledge management system* sehingga seluruh program pembelajaran mudah diakses oleh peserta.
 - 2) Mengintegrasikan seluruh sistem informasi kediklatan dalam kerangka sistem *learning value chain*.
- c. Meningkatkan kualitas layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas agar dapat bersaing dengan penyelenggara diklat sejenis, dengan:
- 1) Meningkatkan kompetensi SDM perancang diklat dan SDM yang menangani teknologi informasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
 - 2) Meningkatkan SDM penyelenggaraan diklat melalui pelatihan/workshop.
 - 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pusdiklatwas dengan penyediaan peralatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) untuk mendukung *digital learning*, peralatan kantor dan pelatihan (Non-teknologi informasi), serta pembangunan *smart building* untuk Pusdiklatwas, Balai Diklat di Denpasar, Medan, dan Makassar.
 - 4) Mengoptimalkan sumber anggaran yang ada di Pusdiklatwas baik yang bersumber dari Rupiah Murni, PNBP, maupun yang bersumber dari *State Accountability Revitalization Project (STAR)-Additional Financing* periode tahun 2020-2024.

BAB III

KEGIATAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

III.1 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Sebagaimana telah di uraikan pada Bab II, bahwa dalam rangka mendukung sasaran strategis BPKP ke-6 yaitu Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat, Pusdiklatwas melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, dan Kegiatan Pelaksanaan Dukungan, dengan sasaran dan target kinerja selama periode Renstras 2020-2024, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kompetensi SDM APIP					
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas layanan Pusdiklatwas					
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik"	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	90,00%

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut Pusdiklatwas membangun *Learning System* (sistem pembelajaran) dan *learning value chain* dengan berbagai aktivitas dan output sebagai berikut:

a. *Learning Need Diagnostic* (Analisis Kebutuhan Pembelajaran)

Learning Need Diagnostic adalah proses untuk *scanning*, analisis, identifikasi dan konfirmasi kebutuhan pembelajaran untuk staf, tim dan unit kerja, sehingga mendapatkan pembelajaran yang tepat, untuk orang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat.

Target output dari aktivitas ini adalah tersedianya kebijakan dan pedoman, serta implementasi Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP).

Aktivitas kunci untuk mencapai output, meliputi siklus:

- 1) Penyusunan kebijakan/pedoman yang memuat pola kerja antar komponen tata kelola GIA Corpu untuk menyusun *training need analysis*;
- 2) Mengimplementasikan kebijakan/pedoman *training need analysis*;
- 3) Menyempurnakan kebijakan/pedoman secara berkelanjutan

b. *Learning Design and Development (Acquiring Learning Solutions)*

Learning Design and Development adalah proses untuk analisis, desain, membuat, mengembangkan, melakukan pilot, dan menjalankan solusi pembelajaran sesuai kebutuhan. Desain, kurikulum, dan pengembangan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan bagi setiap individu dan kebutuhan strategis bagi organisasi, pada masa kini dan masa mendatang.

Target output dari aktivitas ini adalah tersedia dan terimplementasinya *instructional system design (ISD)* yang berisi kurikulum dan silabus serta bahan pembelajaran.

Aktivitas kunci untuk mencapai output, meliputi siklus:

- 1) Penyusunan kebijakan/pedoman yang memuat pola kerja antar komponen tata kelola GIA Corpu untuk menyusun ISD;
- 2) Mengimplementasikan kebijakan/pedoman ISD untuk penyusunan desain dan kurikulum pembelajaran;
- 3) Menyusun *tools* atau solusi pembelajaran sesuai kurikulum dan program pembelajaran, termasuk solusi untuk *digital learning*
- 4) Menyempurnakan kebijakan/pedoman/*tools* secara berkelanjutan

c. *Learning Delivery and Deployment*

Learning Delivery and Deployment adalah proses untuk mentransfer semua materi pembelajaran kepada individu, staf, manajemen, tim dan unit kerja, dan *stakeholders*, serta memastikan (*facilitating*) bahwa peserta pembelajaran mampu mengaplikasikan apa yang dipelajari ditempat pekerjaannya dan berdampak bagi kinerja organisasi.

Delivery and deployment merupakan tahap eksekusi atau implementasi dari proses *learning value chain* sebelumnya, yaitu analisis kebutuhan, desain, dan pengembangan pembelajaran.

Aktivitas kunci dari *Learning Delivery and Deployment* adalah implementasi kurikulum dan *tools/solusi* pembelajaran untuk pelaksanaan diklat yang terdiri dari:

- 1) Penyelenggaraan Diklat Fungsional Auditor bagi APIP BPKP dan Auditor Kementerian/Lembaga/Pemda Penjenjangan Auditor Utama
- 2) Penyelenggaraan Diklat Teknis Substansi bagi APIP BPKP dan Auditor Kementerian/Lembaga/Pemda
- 3) Penyelenggaraan Diklat Kedinasan bagi pegawai BPKP
- 4) Diklat Sertifikasi Non Jabatan Fungsional Auditor yang diselenggarakan untuk perolehan sertifikasi di luar sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan sumber dana Rupiah Murni maupun PHLN (STAR)
- 5) Pelatihan untuk Instruktur, Assessor, dan Trainer dengan sumber dana PHLN (STAR) yang terdiri dari:
 - ✓ Pelatihan Maturitas SPIP/GCIS dan Kapabilitas Internal Audit untuk Instruktur
 - ✓ Pelatihan Maturitas SPIP/GCIS dan Kapabilitas Internal Audit untuk Assessor
 - ✓ Pelatihan untuk Trainer
- 6) *Massive Open Online Course* yakni sistem pembelajaran berupa kursus online secara besar-besaran dan terbuka dengan tujuan untuk memungkinkan partisipasi tak terbatas dan dapat diakses melalui web dengan sumber dana Rupiah Murni dan PNBPN.
- 7) Seminar yakni suatu sistem pembelajaran untuk membahas suatu topik secara khusus dengan sumber dana Rupiah Murni dan PNBPN

d. Learning Impact Measurement

Learning impact Measurement adalah proses untuk memonitor, menilai, evaluasi dan melakukan perbaikan atas proses, output, dan *outcome* dari *Learning Solution* untuk memastikan terjadinya peningkatan performansi organisasi. Proses ini merupakan tahap terakhir dari *learning value chain* untuk memperoleh informasi guna penyerpunaan program pembelajaran.

Target output dari kegiatan ini adalah tersedianya dan terimplementasinya kebijakan/Pedoman/Prosedur evaluasi pembelajaran, serta implementasi evaluasi pembelajaran yang mendukung efektivitas solusi pembelajaran.

Aktivitas Kunci untuk mencapai output meliputi:

- 1) Pengembangan konsep learning evaluation dan/atau *learning impact measurement* , melalui FGD, benchmarking, dan konsultasi dengan expert dan praktisi pembelajaran.
- 2) Penyiapan, pembahasan dan penetapan kebijakan, pedoman, dan prosedur evaluasi pembelajaran.
- 3) Piloting, dan Implementasi berbagai metode dan teknologi evaluasi pembelajaram.
- 4) Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan berbagai metode dan teknologi evalausi pembelajaran secara berkelanjutan.

Pembangunan *learning system* dan *learning value chain* harus mempertimbangkan tata kelola GIA Corpu. Artinya, melibatkan banyak peran dari berbagai unit kerja meliputi unit kerja kesetmaan, unit kerja kedeputian dan Pusdiklatwas BPKP dalam seluruh siklus LVC. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peran-peran tata kelola GIA Corpu, Pusdiklatwas BPKP melaksanakan aktivitas kunci penyediaan sumber daya teknologi informasi meliputi:

- 1) Identifikasi dan pemetaan infrastruktur/jaringan komunikasi data/suara beserta aplikasi yang telah berjalan;
- 2) Pendetilan proses-proses bisnis yang melibatkan seluruh komponen tata kelola GIA Corpu;
- 3) Membuat skala prioritas proses-proses bisnis yang akan dilaksanakan secara digital;
- 4) Mengembangkan aplikasi-aplikasi dengan single platform, serta menyesuaikan aplikasi yang telah ada termasuk integrasi data;
- 5) Menghitung kebutuhan sumber daya komunikasi data/suara untuk efektivitas proses digital;
- 6) Evaluasi dan penyempurnaan infrastruktur/aplikasi yang diimplementasi.

Target output periode 2020-2024 terkait dengan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kegiatan/Output Pusdiklatwas BPKP
Tahun 2020—2024

No	Kegiatan/Output	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
			Target	Target	Target	Target	Target
1	Diklat Fungsional Auditor RM	Orang	280	429	439	439	439
2	Diklat Fungsional Auditor PNB	Orang	2190	1920	2255	2370	2383
3	Diklat Fungsional Auditor STAR	Orang	225	1300	4047	4047	3987
4	Diklat Teknis Substansi RM	Orang	870	1860	2036	2036	2036
5	Diklat Teknis Substansi PNB	Orang	3630	5490	10112	10058	10058
6	Diklat Teknis Substansi STAR	Orang	0	2000	2000	2000	2000
7	Diklat Kedinasan RM	Orang	360	372	407	407	407
8	UD/UPKP RM	Kegiatan	1	1	1	1	1
9	Diklat Sertifikasi Non JFA RM	Orang	210	210	210	210	210
10	Diklat Sertifikasi Non JFA STAR	Orang	64	1400	1517	1423	1060
11	Pelatihan untuk Instruktur, Assessor, dan Trainer STAR	Orang	0	615	615	517	517
12	Massive Open Online Course RM	Orang	2000	3000	3000	3000	3000
13	Massive Open Online Course PNB	Orang	0	1000	1000	2620	2685
14	Pengembangan Kompetensi Pegawai - RM	Orang	2000	100	100	100	100
15	Pengembangan Kompetensi Pegawai - PNB	Orang	65	100	100	140	121
16	Pengembangan GIA Corpu RM	Laporan	35	207	207	207	207
17	Pengembangan GIA Corpu PNB	Bahan Ajar	151	80	80	80	80
18	Pengembangan GIA Corpu STAR	Kegiatan	11	25	25	25	25
19	Penilaian Potensi dan Kompetensi PNB	Orang	18	220	220	220	220

2. Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja					
Indikator Kinerja kegiatan:	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%
1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	75	76	77	78	79
2. Nilai SAKIP Unit Kerja	80	81	82	83	84
3. Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
4. Indeks MR Unit Kerja	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
5. Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	70	76	80	81	82
6. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholders)	70	73	76	80	81
7. Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
8. Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9. Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
10. Skor IKPA Unit Kerja	86	87	88	89	90
11. Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90%	91%	92%	93%	95%
12. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	1	1	1	1	1
13. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut Pusdiklatwas telah merancang kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu:

1) Kegiatan Layanan Perkantoran Pusdiklatwas

Kegiatan ini meliputi layanan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, layanan operasional dan pemeliharaan kantor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung peningkatan kinerja organisasi.

2) Kegiatan Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi dan Umum

Kegiatan layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi dan Umum antara lain berupa kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk mendukung tersusunnya dokumen perencanaan Pusdiklatwas BPKP, dan terlaksananya pertanggung-jawaban keuangan, pengelolaan SDM dan Pengelolaan Barang Milik Negara yang lebih akuntabel.

3) **Kegiatan Layanan Penyelenggaraan SPIP dan Reformasi Birokrasi**

Kegiatan layanan ini antara lain meliputi koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, dan kegiatan lain terkait dengan penyelenggaraan SPIP dan Reformasi Birokrasi di Pusdiklatwas BPKP.

4) **Kegiatan/Layanan Sarana Internal**

Kegiatan layanan sarana Internal berupa pengadaan sarana/peralatan melalui belanja modal pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan atau tugas-tugas pusdiklatwas dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan kediklatan.

5) **Kegiatan Layanan Prasarana internal**

Kegiatan layanan Prasarana Internal berupa pengadaan/rehabilitasi gedung kantor maupun gedung diklat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan kediklatan.

Penetapan target output dari masing-masing kegiatan layanan tersebut dilakukan setiap tahun sesuai dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan kinerja.

III.2 Kebutuhan Pendanaan

Agar dapat melaksanakan strategi dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pusdiklatwas BPKP diperlukan adanya komitmen menyeluruh dari Pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana dengan didukung sarana-prasarana, regulasi serta pendanaan yang mencukupi yang meliputi sumber dana Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) STAR.

Pendanaan dari STAR-*Additional Financing* periode tahun 2020-2024 fokus pada upaya peningkatan kompetensi SDM APIP dan peningkatan kualitas layanan, yang meliputi pendanaan untuk output/kegiatan sebagai berikut:

1. *Output 1 – Capacity of government’s internal auditors and public finance officers developed.*

Output 1 menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk 19.400 orang APIP dan pengelola keuangan baik pada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah

Daerah serta meningkatkan *centers of excellence* meliputi perencanaan, penelitian, dan standarisasi output.

2. *Output 2 – Competency and needs-based e-learning approach institutionalized.*

Output 2 menyediakan reorientasi dan melengkapi fasilitas dan infrastruktur pada Pusdiklatwas baik yang berlokasi di Bogor, Bali, Makassar, dan Medan yang dapat rangka peningkatan fasilitas untuk mendukung diklat *e-learning*.

Prakiraan Anggaran Pusdiklatwas BPKP untuk Periode Tahun 2020-2024 per Program dan Kegiatan, dan per Sumber Pendanaan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Prakiraan Anggaran Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020—2024
Per Program Kegiatan (dalam Ribuan)

Kode	Program/Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
01	Dukungan Manajemen	30.901.068	29.916.032	37.713.240	41.013.787	49.543.143
3676	Pelaksanaan Dukungan manajemen	30.901.068	29.916.032	37.713.240	41.013.787	49.543.143
06	Pengawasan Pembangunan	82.455.518	165.379.393	303.000.041	251.391.011	188.899.622
3674	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	82.455.518	165.379.393	303.000.041	251.391.011	188.899.622
Jumlah		113.356.576	195.295.425	340.713.281	292.404.798	238.442.765

Tabel 3.3
Prakiraan Anggaran Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020—2024
Per Sumber Pendanaan (dalam Ribuan)

No	Anggaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	RM	66.563.982	66.781.649	74.123.441	77.320.509	85.799.285
2	PNBP	38.425.386	28.401.233	35.838.883	37.218.600	37.893.000
3	PHLN	8.367.208	100.112.543	230.750.958	177.865.689	114.750.480
Jumlah		113.356.576	195.295.425	340.713.281	292.404.798	238.442.765

Rincian output dan anggaran selama periode 2020-2024 selengkapnya terdapat dalam Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan untuk menjamin koherensi dan sinkronisasi program-program Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020-2024 mengadopsi Renstra BPKP 2020-2024 yang sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan serta mengacu kepada Pedoman Penyusunan Renstra - Kementerian Lembaga Tahun 2020-2024 seperti diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019. Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Pusdiklatwas BPKP yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar dapat tercapai visi, misi, dan tujuan Pusdiklatwas BPKP. Tujuan tersebut tidak semata untuk kepentingan sendiri, namun untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP. Rencana Strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Dengan demikian proses pencapaiannya akan dapat dilalui secara lebih terarah dan terencana. Yang jelas, substansi Rencana Strategis masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), sehingga sangat memungkinkan untuk direalisasikan, dipantau pelaksanaannya dan dievaluasi. Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Pusdiklatwas BPKP, untuk bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis ini.

MATRIKS KEGIATAN/OUTPUT PUSDIKLATWAS BPKP
TAHUN 2020-2024

No	Kegiatan	Tahun														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Satuan	Anggaran (Rp)												
1	Diklat Fungsional Auditor RM	280	Orang	14,101,290	429	Orang	10,702,570	439	Orang	10,805,070	439	Orang	10,805,070	439	Orang	10,805,070
2	Diklat Fungsional Auditor PNBPNBP	2,190	Orang	12,602,598	1920	Orang	8,448,486	2255	Orang	11,448,486	2370	Orang	12,036,030	2383	Orang	12,101,810
3	Diklat Fungsional Auditor STAR	225	Orang	4,852,645	1300	Orang	28,422,635	2487	Orang	28,422,635	2487	Orang	28,422,635	2427	Orang	27,729,400
4	Diklat Teknis Substansi RM	870	Orang	9,796,139	1860	Orang	14,685,515	2036	Orang	14,685,515	2036	Orang	14,685,515	2036	Orang	14,685,515
5	Diklat Teknis Substansi PNBPNBP	3,630	Orang	8,448,486	5490	Orang	10,449,665	10112	Orang	14,763,670	10058	Orang	14,685,515	10058	Orang	14,685,515
6	Diklat Teknis Substansi STAR	-	Orang	-	2000	Orang	21,195,900									
7	Diklat Kedinasan RM	360	Orang	7,624,750	372	Orang	7,624,750	407	Orang	7,624,750	407	Orang	7,624,750	407	Orang	7,624,750
8	UD/UPKP RM	1	Kegiatan	70,100												
9	Diklat Sertifikasi Non JFA RM	210	Orang	1,961,985												
10	Diklat Sertifikasi Non JFA STAR	64	Orang	19,040,000	1040	Orang	19,040,000	1157	Orang	20,720,000	1063	Orang	19,040,000	1052	Orang	18,830,000
11	Pelatihan untuk Instruktur, Assessor, dan Trainer STAR	-	Orang	-	492	Orang	5,298,975	492	Orang	5,298,975	394	Orang	4,239,180	394	Orang	4,239,180
12	Massive Open Online Course RM	2000	Orang	355,360	3000	Orang	355,360									
13	Massive Open Online Course PNBPNBP	0	Orang	-	1000	Orang	200,580	1000	Orang	200,580	2620	Orang	525,580	2685	Orang	538,580
14	Pengembangan Kompetensi Pegawai - RM	2000	Orang	600,837	100	Orang	600,837									
15	Pengembangan Kompetensi Pegawai - PNBPNBP	65	Orang	494,830	100	Orang	494,800	100	Orang	494,830	140	Orang	694,830	121	Orang	600,837
16	Pengembangan GIA Corpu RM	35	Laporan	2,994,500	207	Laporan	2,994,500									
17	Pengembangan GIA Corpu PNBPNBP	151	Bahan Ajar	6,243,400	80	Bahan Ajar	6,243,430	80	Bahan Ajar	6,243,400	80	Bahan Ajar	6,243,400	80	Bahan Ajar	6,243,400
18	Pengembangan GIA Corpu STAR	11	Kegiatan	26,155,033	25	Kegiatan	26,155,033	25	Kegiatan	155,113,448	25	Kegiatan	104,967,974	25	Kegiatan	42,756,000
19	Penilaian Potensi dan Kompetensi PNBPNBP	18	Orang	434,272	220	Orang	434,272	220	Orang	434,272	220	Orang	435,040	220	Orang	435,040